

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

- 1) Pengawasan tidak langsung DPRD melalui Rapat Koordinasi / Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Gugus Tugas (SATGAS) Covid-19 Kabupaten Timor Tengah Utara cukup efektif dalam proses penanganan Covid-19.
- 2) Pengawasan langsung DPRD melalui penyerapan aspirasi dan menyampaikan keluhan masyarakat kepada (SATGAS) Covid-19 Kabupaten Timor Tengah Utara terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan proses penanganan pasien terinfeksi di tempat-tempat karantina serta proses pemakaman jenazah Covid-19 yang sangat bertentangan dengan pihak keluarga jenazah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menyarankan bahwa:

- 1) Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Timor Tengah Utara perlu tingkatkan pengawasannya terhadap setiap kebijakan pemerintah Daerah.
- 2) Sebagai lembaga penyerapan dan penyampaian aspirasi masyarakat, DPRD Timor Tengah Utara harus bertindak sesuai dengan keluhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

Hamidi, Jazim, 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Prestasi Pustakarayah.

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwanda, Dadang, dan Piliang, Akmal Malik, *Penguatan Pengawasan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (CORONA VIRUS-19)*.

Tarmidji, A. Z. 1992. *Fungsi Kontrol DPRD Dalam Pemerintahan Daerah*. Angkasa Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan direvisi dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 7 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan

Corona Virus Disease 2019 (CORONA VIRUS-19). Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 2020. 1–38 p.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease (COVID-19) Revisi ke-4*. Jakarta: Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Sub Direktorat Penyakit Infeksi Emerging;

Perbup TTU-Nomor-59-Tahun-2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*

Jurnal

Aminudin, (2015) *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, EJurnal Katalogis, No.3 (12).

Ilham Pasamai, S. (2021) *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan*. Journal of Lex Generalis (JLS), 2 No 3.

- Pujianti, M. S. R. (2020). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Studi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol 1 No 5.
- Taufiqurrahman, M., & Sen, W. C. (2020). *Peran DPRD Dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) CORONA VIRUS-19* Pemerintah Kota Medan. Jurnal Retenrum, 1, 134–142.
- Yusrizal. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi CORONA VIRUS-19. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, 19, 21–36.
- ZA, S. Bimo. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Corona Virus-19 Bagi Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri
- Liky Faizal, “*Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*,” Jurnal TAPIs, Vol. 7 No.13, Juli-Desember 2013

Sumber lain

- Lampiran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* Kantor Dinas Kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020-2021.